**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Review**

Jurnal oleh **M Makhfudz** yang berjudul **Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia.** Tindak pidana penjualan orang disebabkan karena faktor tekanan ekonomi di Tanah Air,tapi kemudian lama kelamaan bekembang karena sulit mencari lapangan kerja.Kesulitan membuka lapangan kerja itu juga didukung oleh program Pemerintah yg mengalami kegagalan dalam melakukan pembangunan karena tidak di minati oleh Investor Asing karena problema internal negara yaitu banyaknya Pungli (pungutan liar) situasi dan kondisi negara yang tidak stabil baik dari kondisi ekonomi negara maupun keamanan. Kemudian tambah berkembang lagi karena dukungan terbentuknya kelompok sindikat di luar negeri,sehingga mendorong perbuatan Pidana Penjualan Orang menjadi sebuah industri. Tindak pidana perdagangan orang lahir karena permasalahan bangsa Indonesia di saat ini dihadapkan pada kemiskinan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sehingga, pemerintah terpaksa membuka program – program antar kerja antara negara, yaitu mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).[[1]](#footnote-1)

Kajian dalam permasalahan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang deskriptif, yaitu dengan membandingkan aturan hukum yang ada, dan pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pelaksanaannya di lapangan.

*“****Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”***

Pendekatan lain yang cukup relevan adalah pendekatan analisis. Artinya, untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan maupun dalam konvensi internasional secara tekstual, sekaligus mengetahui konstekstualnya terutama dalam penerapannya melalui praktek dan putusan hukum yang dilengkapi dengan pendekatan kasus.

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana perdagangan orang ini, masuk dalam kelompok tindak pidana yang transnasional, sama seperti tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan narkoba dan teroris, yang harus mendapat perlakuan yang luar biasa, dan mendapatkan hukuman yang berat *(extra-ordinary crime).*

Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut protokol *trafficiking*). Dalam protokol ini, pengertian *trafficking* ialah :

**“Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk – bentuk lain dari kekerasan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi”**

PBB dalam sidang umumnya tahun 1994 mendefinisikan *trafficking* sebagai pemindahan orang melewati batas teritorial, nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindaka ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang dan sindikasi kejahatan.

Jurnal Oleh **Eka Jaya Putra Hatika Embang** yang berjudul **Peran *Unit Counter-Trafficking* IOM (*International Organization For Migration*) Indonesia Dalam Upaya Menangani *Human Trafficking* di Kalimantan Barat (2004-2010).**

Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, menyebabkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi akses bagi para pelaku *trafficking* untuk keluar masuk Kalimantan Barat dan Malaysia. Dalam perkembangannya terjadi peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia, dimana Provinsi Kalimantan Barat

menempati peringkat kedua dari dua belas daerah lainnya yaitu dengan 722 kasus. Tingginya kasus perdagangan manusia di Indonesia menarik perhatian dari IOM (*Internatioal Organization for Migration*) untuk memberikan respon kemanusiaan terhadap permasalahan tersebut. Sebagai upaya untuk menekan kasus *human trafficking* sejak tahun 2003 IOM Indonesia membentuk unit *Counter-Trafficking* yang berkerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat untuk memerangi *human trafficking* melalui pendekatan yang komprehensif: pencegahan perdagangan manusia, diantaranya melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan korban, yaitu pemulangan, pemulihan dan reintegrasi; pendakwaan bagi pelaku perdagangan orang / manusia melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum; dan riset. Selain berkerjasama dengan pemerintah dan kepolisian IOM berkerjasama dengan Organisasi Aisyiyah cabang Kalimantan Barat pada tahun 2005, sejak saat itu organisasi ini memberikan tempat penampungan sementara dan bantuan reintegrasi bagi korban trafiking yang diidentifikasi oleh IOM.

Konsep Organisasi Internasional ,Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.[[2]](#footnote-2)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian metode penelitian deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dan dianalisis dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain.

Jurnal oleh **Riska Ruly Darmastuti** yang berjudul  **Kerjasama Polri dan Iom dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di IndonesiaTahun 2007-2013.** Perdagangan manusia *(Trafficking in Person)* merupakan salah satu kejahatan transnasional dan terorganisir yang semakin berkembang pesat. Kejahatan ini telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena bertujuan untuk mengeksploitasi para korban.Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi nomor dua setelah Thailand sebagai negara yang masih marak terjadinya perdagangan manusia.[[3]](#footnote-3) Di Indonesia, kasus kejahatan perdagangan manusia yang terjadi ditangani oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri sebagai institusi penegakhukum di Indonesia, merupakan institusi yang sangat berperan penting dalam menangani kasus perdagangan manusia hingga ke meja peradilan.Untuk menanggulangi praktek kejahatan perdagangan manusia, Polri bekerjasama dengan organisasi internasional IOM yang mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan kepada bentuk kerjasama Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, dan apa saja faktor pendorong dan penghambat kerjasama tersebut sehingga menyebabkan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan laporan *Trafficking in Person* yang dikeluarkan oleh *United* *States Departement of State,* Indonesia menjadi negara sumber, tujuan dan transit bagi bagi perdagangan seks dan kerja paksa bagi perempuan, anak-anak, dan pria. Di Indonesia, praktek kejahatan perdagangan manusiasangat sulit untuk ditanggulagi karena para pelakumempunyai sindikat atau jaringanyang sangat luas (lintas negara) dan sangat terselubung sehingga sangat sulit untukmemberantasnya.[[4]](#footnote-4) Dari signifikasi yang telah di uraikandi atas, penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Bentuk kerjasama Polri dan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia dan faktor-faktor pendorong serta penghambatkerjasama yang dijalin antara Polri dan IOM” merupakan hal yang penting untuk diketahui.Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kejahatan transnasional yang dapat menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia termasuk kejahatan yang bersifat lintas negara dan terorganisir serta berdampak terhadap ke negara-negara lain, teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menjelaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia sudah termasuk kedalam kategori pelanggaran terhadap HAM, dan teori liberal institusionalisme yang yangmenganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antarnegara adalah suatu hal yang penting danmenekankan pentingnya kerjasama dalam memenuhi keterbatasan negara. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana penulis akan memberikan penjelasan lalu menganalisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dan *library research*. Kerjasama antara Polri dan IOM memang sudah dilakukan dan diwujudkan melalui berbagai programnya baik untuk masyarakat umum maupun untuk para aparat penegak hukum di Indonesia.. Akhirnya dapat disimpulkan, kerjasama antara Polri dan IOM dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal.

**Tabel I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Judul** | Jurnal : Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia | Jurnal : Peran *Unit Counter-Trafficking* IOM (*International Organization For Migration*) Indonesia Dalam Upaya Menangani *Human Trafficking* di Kalimantan Barat  (2004-2010) | Jurnal : Kerjasama Polri dan Iom dalam Menanggulangi  Perdagangan Manusia di Indonesia  Tahun 2007-2013 |
| **Penulis** | M Makhfudz | Eka Jaya Putra Hatika Embang | Riska Ruly Darmastuti |
| **Metode** | Hukum Normatif Deskriptif (membandingkan hukum yang ada dengan pelaksaan hukum di lapangan) | Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian menggunakan tipe penelitian metode penelitian deskriptif. | Library Research dan Wawancara |
| **Teori** | UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Protokol Palermo *(Trafficking Protocol)* dari UN | Teori Organisasi Internasional Rudy T May | Teori Kejahatan Transnasional (berfokus pada pelanggaran HAM) |
| **Persamaan/**  **Perbedaan** | **Persamaan :** memakai Teori Protokol Palermo dari UN  **Perbedaan :** UU Nomor 21 Tahun 2007 dipakai sebagai acuan bentuk kerjasama IOM dengan Pemerintah (POLRI) dalam upaya menangani kasus Perdagangan Manusia | **Persamaan :** menggunakan teori dan metode penelitian yang sama  **Perbedan :** lebih terfokus pada peran IOM dalam manyelesaikan kasus Perdagangan Manusia melalui tenaga kerja yang berada di Malaysia. | **Persamaan :** membahas kerjasama IOM-POLRI  **Perbedaan :** Teori berfokus pada Organisasi Internasional |

**Literatur Review**

**2.2 Kerangka Teoritis**

Dalam memahami dan mempermudah proses penelitian ini, peneliti membutuhkan teori-teori yang dapat membantu mendasari atau mendukung penelitian agar tidak meluas dari tema yang telah ditentukan. Dengan adanya teori-teori tersebut diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini agar pesan yang ingin disampaikan peneliti bisa tersampaikan dengan baik. Dalam kajian pusataka ini akan dijelaskan teori hubungan internasional dimana teori ini menjadi dasar bagi penelitian ini. Teori hubungan internasional menjadi teori pertama yang akan dijelaskan.

**2.2.1 Hubungan Internasional**

dalam memahami interaksi yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kepentingan-kepentingan nasionalnya, hal tersebut dinamakan hubungan internasioanal (I*nternational Relations).* Hubungan internasional sendiri merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lainya yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubu ngan internasional merupakan suatu keharusan akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkanm adanya suatu negara yang menutup diri dari dunia luar.[[5]](#footnote-5)

Definisi Hubungan Internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya politik internasional adalah. [[6]](#footnote-6)

**“Hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”.**

Definisi hubungan internasional menurut Mc. Clelleand adalah:[[7]](#footnote-7)

**“ Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan tertentu termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi transaksi “**

**2.2.2 Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan yang pembentukannya berdasarkan pada perjanjian antar anggota-amggotanya (pemerintah dan atau bukan pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.[[8]](#footnote-8)

Menurut Leroy Bennet, fungsi utama dari organisasi internasional yaitu untuk mengadakan upaya-upaya kerjasama antarnegara dalam bidang-bidang tertentu dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan-keuntungan bagi seluruh maupun sebagian besar anggotanya.[[9]](#footnote-9)

Selain itu penulis juga menggunakan teori peranan dalam organisasi internasional yaitu Peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem.

Clive Archer mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Jika dilihat dari keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Berdasarkan tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara-negara sebagai anggota atau *Intergovernmental Organization* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-governmental Organization* (INGO). Berdasarkan jangkauan keanggotaan, organisasi ada yang keanggotaannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan ada yang keanggotaannya mencakup seluruh wilayah dunia.[[10]](#footnote-10)

**Konsep Organisasi Internasional**

Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan peran-peran dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya. Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.[[11]](#footnote-11) Secara terinci, penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

A. Kegiatan Administrasi

1. Organisasi Internasional Antar-pemerintah (*Inter-Governmental Organization / IGO*). Anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Kegiatan administrasinya diatur berlandaskan hukum publik.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization / NGO*) atau INGO (*International Non-Governmental Organization*) untuk membedakan antara NGO yang internasional dengan NGO yang berluang-lingkup domestik (dalam satu negara). INGO pada umumnya merupakan organisasi di bidang olah raga, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan kesenian. Kegiatan administrasinya diatur berdasarkan hukum perdata.

B. Ruang-lingkup (Wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan

1. Organisasi Internasional Global

Wilayah kegiatan adalah global, dan keanggotaan terbuka dalam ruang-lingkup diberbagai penjuru dunia.

2. Organisasi Internasional Regional

Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja.

C. Bidang Kegiatan (*Operasional*) Organisasi

Untuk ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya :

1. Bidang Ekonomi

2. Bidang Lingkungan Hidup

3. Bidang Kesehatan

4. Bidang Pertambangan

5. Bidang Komoditi (Pertanian dan Industri)

6. Bidang Bea-cukai dan Perdagangan Internasional

D. Tujuan dan Luas-Bidang Kegiatan Organisasi

1. Organisasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum)

Tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum bukan hanya menyangkut bidang tertentu.

2. Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal khusus)

Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja.

E. Ruang-lingkup (Wilayah) dan Bidang Kegiatan

1. Organisasi Internasional : Global-Umum

2. Organisasi Internasional : Global-Khusus

3. Organisasi Internasional : Regional-Umum

4. Organisasi Internasional : Regional-Khusus

F. Menurut Taraf Kewenangan (Kekuasaan)

1. Organisasi Supra-nasional (*Supra-national Organization*)

Kedudukan dan Kewenangan Organisasi Internasional berada di atas negara-negara anggota.

2. Organisasi Kerjasama (*Co-operative Organization*)

Kedudukan dan Kewenangan Organisasi Internasional tidak lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Organisasi adalah wadah kerjasama berdasarkan kesepakatan anggota.

G. Bentuk dan PolaKerjasama

1. Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*) yang adakalanya disebut “*institutional alliance*”.

2. Kerjasama Fungsional (*Functional Co-operation*)

Organisasi yang didasarkan kepada kerjasama fungsional ini, jumlahnya sangat banyak. Ada kerjasama fungsional di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya; disamping pola kerjasama secara umum (mencakup berbagai bidang).

H. Fungsi Organisasi

1. Organisasi Politikal (*Political Organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Mungkin saja, titik-berat pola kerjasama adalah ekonomi dan sosial-budaya tetapi tidak dapat melepaskan sepenuhnya kaitan hal-hal lainnya itu terhadap politik.

2. Organisasi Administratif (*Administrative Organization*), yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif.Misalnya: pengaturan lalu lintas dan ketentuan mengenai pos, lalu-lintas dan ketentuan telekomunikasi, ketentuan jalur pelayaran dan jalur penerbangan, pengaturan kuota serta tingkat harga minyak atau komoditi lain.

3. Organisasi Peradilan (*Judical Organization*), yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politk, ekonomi, hukum, sosial dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional).

**2.2.3 Teori Human Trafficking**

Melihat semakin meningkatnya isu perdagangan manusia di dunia internasional, Perserikatan Bangsa - Bangsa sebagai rezim terbesar di dunia menginisiasi terbentuknya Protokol Palermo atau *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons,* *Especially Woman and Children* pada tahun 2000. Para negara anggota yang meratifikasi protokol tersebut dihimbau untuk mematuhi setiap pasal yang tercantum dalam protokol negaranya mendapatkan keadilantersebut di mana salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip *Prevention, Prosecution*, ndan *Protection* sebagai strategi untuk menangani masalah perdagangan manusia di negara mereka.

Definisi perdagangan orang menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi (korban) perdagangan orang. Pasal 3 *the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, yang melengkapi *the UN Convention Against Transnational Organized Crime*, memuat definisi perdagangan orang sebagai berikut:

**"(a) 'Perdagangan orang' berarti pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau penerimaan pembayaran-pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk didalamnya adalah, paling minimum, eksploitasi pelacuran pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan-pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh manusia”.**

**"(b) Persetujuan dari korban perdagangan orang untuk eksploitasi yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) Pasal ini menjadi tidak relevan dimana cara-cara apapun yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) telah dipakai”**

**“(c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau menerima seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap sebagai ‘perdagangan orang’ walaupun hal ini tidak melibatkan cara-cara apapun yang dinyatakan dalam sub-alinea (a) Pasal ini”**

**“(d) ‘Anak’ berarti siapapun yang berusia dibawah delapan belas tahun.”**

Kunci untuk memahami definisi ini adalah dengan mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu **proses, cara** dan **tujuan.** Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. **Proses,** diartikan sebagai pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang. Dalam hal ini tidak semua unsur harus dipenuhi. Salah satu dari proses tersebut sudah terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi perdagangan orang. [[12]](#footnote-12) **Cara**, diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau penerimaan pembayaran-pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain.[[13]](#footnote-13) **Tujuan,** yaitu untuk tujuan eksploitasi.

**2.2.4 Definisi Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah tiap orang yang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[14]](#footnote-14)

Dari definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan istilah tenga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Namun istilah TKI yang sering kita dengar dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di luar negeri. Maka, Tenaga kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri.

**2.2.5 Perspektif Migrasi Dari Sosiologis**

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Secara garis besar ada dua faktor yang paling dominan ketika menjelaskan penyebab migrasi. Yaitu : [[15]](#footnote-15)

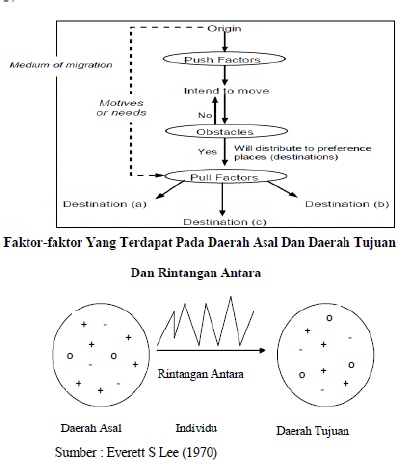
1. Faktor Pendorong

 menyebabkan sejumlah penduduk terdorong melakukan tindakan sosial dengan cara bermigrasi untuk menajaga kelangsungan hidup (*Human Flow*). Faktor pendorong dipengarui kesempatan kerja, terbatas lahan didesa, konflik sosial pedesaan, perubahan iklim,  bencana alam dan sebagainya. Semakin maju kondisi sosial ekonomi suatu negara,  perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi yang memberikan peluang kerja yang lebih besar dengan upah atau gaji yang lebih besar menjadi

2. Faktor Penarik

 bagi pendatang untuk bermigrasi. Pertimbangan individu memberikan penilaian apakah suatu daerah memenuhi kebutuhannya atau tidak. Ada empat faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu: (1). faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2). faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan (3). Rintangan-rintangan yang menghambat (4). faktor-faktor pribadi/individu. Rintangan yaitu dapat berupa biaya pindah yang tinggi, topografi daerah dan  juga sarana transportasi, Didaerah asal maupun daerah tujuan terdapat beberapa faktor yaitu faktor positif (+), faktor negatif (-) dan faktor netral (o). Faktor positif adalah faktor yang memberikan keuntungan apabila bertempat tinggal

di daerah tersebut. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah tersebut yang menjadikan alasan untuk pergi dari daerah tersebut. Sedangkan yang dimaksud faktor netral adalah faktor yang ada pada daerah asal dan daerah tujuan namun tidak mempengaruhi individu untuk berada di daerah tersebut.



**2.3. Hipotesis**

Berdasarkan asumsi dan kerangka teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : dengan adanya peran International Organization for Migration (IOM) dalam kasus *Human Trafficking* melalui tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia sehingga dapat mengurangi jumlah korban.

**2.4 Operasional Variabel dan Indikator**

**Tabel II**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas (Independen) :**  Upaya International Organization for Migration (IOM) dalam menyelesaikan kasus Perdagangan Manusia melalui tenaga kerja. | 1. Membantu pemerintah Indonesia dalam membuat instrumen hukum mengenai perdagangan manusia  2. Bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia (salah satunya dengan POLRI)  3. Membentuk Bidang Pembinaan dan Bidang Operasional (adanya kegiatan *Preemptive* dan *Preventive*) | 1. penguatan UU 39 Tahun 2004 tentang PPTKI  2. *MoU ,*dari Jurnal Riska Ruly Darmasputri  3. *Annual Report* IOM 2009 |
| **Variabel Terikat (dependen):**  Maka akan mengurangi angka kasus korban perdagangan manusia terutama tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Malaysia. | 1. Mengurangi angka yang menjadi korban | 1. Data *Annual Report* IOM 2009 |

**2.5 Skema Kerangka Teoritis**

PERAN IOM ( *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*) DALAM PERMASALAHAN *HUMAN TRAFFICKING*, STUDI KASUS : TKW (TENAGA KERJA WANITA) INDONESIA DI MALAYSIA

PERAN IOM ( *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*) DALAM PERMASALAHAN *HUMAN TRAFFICKING* **(V1)**

STUDI KASUS : TKW (TENAGA KERJA WANITA) INDONESIA DI MALAYSIA **(V2)**

**Mayor Teori**

Tenaga Kerja Wanita

**Mayor Teori**

Teori Hubungan Internasional

Organisasi Internasional

Human Trafficking

**Minor Teori**

Persfektif Migrasi dalam Sosiologis

**Minor Teori**

Protokol Palermo (Perjanian sebuah perangkat hukum bagi semua yang negarayang meratifikasi atau menyutujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum kasusu Human Trafficking, terutama perempuan dan anak

**Protoko Palermoi**

**Hipotesis**

dengan adanya peran International Organization for Migration (IOM) dalam kasus *Human Trafficking* melalui tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia sehingga dapat mengurangi jumlah korban.

1. Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja***, (**Djambatan ;Jakarta, 2001) hlm. 10-26. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rudy T. May. *Administrasi dan Organisasi Internasional, (*Refika Aditama, 2009) [↑](#footnote-ref-2)
3. *Annual Report Activities IOM in 2013*. (2013). [↑](#footnote-ref-3)
4. Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia. (*Jakarta: Sinar Grafika, 2010)Hlm 138 [↑](#footnote-ref-4)
5. AA, Perwita, dan Y.M, Yani, *Pengantar ilmu hubungan internasional*, (Rosdakarya, 2005 ) [↑](#footnote-ref-5)
6. K J Holsty, *Politik internasional: suatu kerangka analisis* (terjemahan Wawan Juanda), (Bandung:Bina Cipta:1992), hlm. 26-27 [↑](#footnote-ref-6)
7. Charles Mc. Clelleand, *Ilmu hubungan internasional: teory dan system* disunting oleh Drs. H. Adil (1981), hlm.27. [↑](#footnote-ref-7)
8. Clive Archer, *International Organization*, 3rd edn. (London: Routledge. 2001) Hlm.35 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bennett, Alvin LeRoy.. *International Organizational : Principles and Issues*. (New Jersey : Prentice-Hall. 1983) Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Op,Cit, Clive Archer [↑](#footnote-ref-10)
11. Rudy, T. May. *Administrasi dan Organisasi Internasional, (*Refika Aditama, 2009) [↑](#footnote-ref-11)
12. UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “*Twilight zone”,* cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific,* Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003. [↑](#footnote-ref-12)
13. *,.Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, (Jakarta 1994), hlm. 04 [↑](#footnote-ref-14)
15. S, ee, Everett Terjemahan Hans Daeng, 1984 , Suatu Teori Migrasi, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-15)